

## **Dampak Kebijakan Subsidi Gas LPG 3 Kg Terhadap Ketimpangan Sosial Ekonomi di Desa Mendalo Indah**

Mey Lina Mariani Sipayung<sup>a</sup>, Dinda Aulia<sup>b</sup>, Ahmad Rifki<sup>c</sup>, Luvita Khanza<sup>d</sup>, Salsa Billa<sup>e</sup>, Rista Dewi Simbolon<sup>f</sup>

Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

### **ARTICLE HISTORY**

Submitted: June 11, 2025

Reviewed June 12, 2025

Accepted: June 29, 2025

### **ABSTRACT**

*The 3 kg LPG gas subsidy policy is a government program that aims to ease the burden on poor households in meeting domestic energy needs. However, in practice in Mendalo Indah Village, this policy faces various challenges that have an impact on increasing social and economic inequality. This study aims to analyze the implementation of the 3 kg LPG subsidy policy and its impact on the socioeconomic balance of the village community. The approach used is qualitative with a structured interview method to the main informants and key informants, as well as field observations and literature studies as supporting data. The results showed that the implementation of subsidies was not well-targeted, with subsidized gas being enjoyed more by the upper middle class. In addition, unequal distribution makes access to subsidized LPG more difficult for residents in peripheral areas of the village, while small businesses also take advantage of subsidies for business purposes, which should be prohibited. The impact of this inequality has led to social jealousy, reduced trust among citizens and in the government, and widened the economic gap between communities. The conclusion of this study emphasizes the importance of reforming the data collection and subsidy monitoring system by utilizing databases such as DTKS and NIK, and the need to strengthen regulations and law enforcement so that subsidies are truly targeted.*

### **KEYWORDS**

*LPG 3 Kg gas Subsidy<sup>1</sup>, Socio-Economic Inequality<sup>2</sup>, Uneven Distribution<sup>3</sup>*

---

## **1. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara berkembang yang tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, distribusi kesejahteraan yang tidak merata masih menjadi

---

masalah utama, bahkan melebihi persoalan lainnya. Kondisi ini menyebabkan jutaan warga kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak, terbatas dalam akses layanan kesehatan, dan menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan publik. Permasalahan kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga dapat ditemukan di negara-negara maju. Meskipun demikian, tingkat keparahan kemiskinan di negara maju tidak sebesar yang dialami oleh negara berkembang (Suci Rahmalia 2019). Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketika individu atau sekelompok orang tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka guna mempertahankan serta meningkatkan taraf hidup yang layak dan bermartabat (Badan Pusat Statistik 2023).

Salah satu kebijakan negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum adalah dengan memberikan subsidi sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan subsidi di Indonesia diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat prasejahtera yang ekonominya menengah ke bawah untuk tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik guna mencapai pembangunan ekonomi dan sosial (Novaria Nainggolan et al. 2024). Dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan, tidak sedikit rencana yang telah pemerintah lakukan. Salah satu bentuk pengentasan kemiskinan adalah melalui pemberian berbagai jenis subsidi, salah satu contohnya adalah subsidi LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg. Pengadaan LPG tabung 3 kg menjadi salah satu kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan pengelolaan energi nasional. Kebijakan tersebut bentuk upaya nyata dari pemerintah dalam menjamin kebutuhan energi masyarakat, khususnya rumah tangga tidak mampu agar tercipta akses energi yang adil bagi semua kalangan (Munandar Hamzah and Haq 2022).

Berdasarkan Undang-undang No 27 Tahun 2001 Tentang kegiatan usaha hilir gas, seluruh bisnis ataupun usaha minyak dan gas LPG sudah terbuka bagi pelaku usaha maupun kondisi di pasar yang menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi yang besar dan sekarang menjadi komoditi yang sangat penting bagi masyarakat. (Reni Helvira 2023) mengungkapkan bahwa tingginya tingkat konsumsi gas LPG 3 kg sangat dipengaruhi oleh keberadaan subsidi pemerintah. Namun, penghapusan subsidi secara tiba-tiba atau tanpa perbaikan sistem distribusi justru dapat menimbulkan dampak negatif pada perilaku konsumsi masyarakat miskin. Meski memiliki manfaat besar dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses energi yang terjangkau, pelaksanaan subsidi ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal ketepatan sasaran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat agar subsidi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Selain itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem distribusi energi yang adil, efisien, dan berkelanjutan, demi tercapainya pembangunan yang inklusif serta pengurangan ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia

Implementasi subsidi menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketidaktepatan sasaran dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial ekonomi. Subsidi LPG 3Kg juga menjadi sorotan karena kurangnya ketepatan dalam segi sasaran sehingga menjadikan kurangnya efektif bantuan subsidi Gas Lpg 3 Kg. Penelitian (Dwi Lestari 2023) mengatakan bahwa adanya sekitar 40% pengguna Gas LPG 3 kg merupakan kelompok masyarakat menengah ke atas sehingga menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan sasaran kebijakan distribusi. Ketidaktepatan sasaran ini bukan hanya membebani

anggaran negara, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial ekonomi, karena masyarakat miskin kesulitan mengakses energi bersubsidi yang seharusnya menjadi hak mereka.

Implementasi subsidi menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketepatan sasaran dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial ekonomi. Subsidi Gas LPG 3Kg juga menjadi sorotan karena kurangnya ketepatan dalam segi sasaran sehingga menjadikan kurangnya efektif bantuan subsidi Gas Lpg 3 Kg. Golongan rakyat yg paling banyak menerima Gas LPG bersubsidi merupakan mereka dari golongan mampu. Menurut (Izani 2022)Penyaluran subsidi sebesar 77% diberikan kepada 25% keluarga dengan pendapatan bulanan (pengeluaran) terbesar, sementara 25% rumah tangga dengan pendapatan bulanan (pengeluaran) terendah mendapatkan subsidi sekitar 15%. Fakta ini memberitahukan bahwa selama ini pengguna Gas LPG bersubsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Dalam hal ini titik tumpunya adalah tidak merata dan tidak tepat sarasanya kebijakan dari pemerintah, yang semula direncanakan untuk rumah tangga dan usaha mikro yang memang berkebutuhan akan tetapi implementasinya adalah masyarakat golongan menengah keatas.

Fenomena ketimpangan akibat subsidi 3 kg Gas LPG tidak hanya terjadi dikota kota besar tetapi juga sampai ke Desa Mendalo Indah yang menjadi representasi nyata dari dampak kebijakan subsidi gas LPG 3 kg terhadap ketimpangan sosial ekonomi di tingkat lokal. Ketidaktepatan ini menimbulkan masalah baru di antaranya ketidakefisienan penggunaan anggaran negara, potensi penyalahgunaan subsidi, kecemburuan sosial yang dapat memicu ketegangan antar lapisan Masyarakat serta ketidaktepatan penyaluran subsidi bahkan dapat memperburuk ketimpangan sosial ekonomi.

Masalah yang terjadi pada Desa Mendalo Indah merupakan salah satu kasus dari banyaknya kasus dari dampak subsidi gas LPG 3KG yang ada di Indonesia, dimana permasalahan demi permasalahan yang terjadi relatif sama. Oleh karena itu, penting untuk mendalami lebih jauh bagaimana dinamika pelaksanaan kebijakan gas subsidi gas LPG 3 kg berkontribusi terhadap ketimpangan sosial ekonomi, khususnya di Desa Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan tujuan mengumpulkan dan menganalisis data yang telah diperoleh. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap situasi tertentu, khususnya dalam konteks distribusi subsidi gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Metode ini dilakukan untuk mengkaji perilaku konsumen dalam penggunaan gas LPG 3 kg bersubsidi, menelaah sistem distribusi yang ada, serta mengevaluasi dampaknya terhadap ketimpangan sosial di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi secara langsung di lapangan dan wawancara. Pengumpulan data diperoleh dari lima konsumen gas LPG 3 kg sebagai informan utama dan distributor gas LPG 3 kg sebagai informan kunci. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2025 di Desa Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi.

---

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan menggunakan pola wawancara berstruktur terhadap informan utama dan informan kunci, maka didapatkan hasil bahwa tataran implementasi kebijakan subsidi gas LPG 3 Kg secara regulasi terlihat berjalan dengan baik. Namun demikian, pada tataran implementasi ditemukan masih banyak permasalahan yang terjadi khususnya ketidaksetaraan harga dan sasaran konsumen yang kurang tepat. Permasalahan ini pula yang menjadi keluhan dari berbagai informan yang telah kami wawancarai, dimana distribusi gas LPG bersubsidi di Desa Mendalo Indah cenderung tidak merata, dan seringkali dinikmati oleh masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori miskin, sehingga memicu ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.

Berikut pembahasan yang akan menguraikan berbagai aspek secara lebih rinci terkait “Dampak Kebijakan Subsidi Gas Lpg 3 Kg Terhadap Ketimpangan Sosial Ekonomi di Desa Mendalo Indah”.

#### **Ketidaktepatan Sasaran Penerima Subsidi**

Kebijakan subsidi gas LPG 3 kg pada dasarnya bertujuan membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan energi dasar, terutama untuk memasak. Namun, di Desa Mendalo Indah, pelaksanaan subsidi tersebut mengalami ketidaktepatan yang menyebabkan tujuan awal program tidak tercapai. Dari hasil wawancara dengan narasumber utama, ditemukan bahwa gas LPG bersubsidi tidak hanya digunakan oleh keluarga miskin, tetapi juga oleh masyarakat kelas menengah ke atas yang seharusnya bukan penerima manfaat. Ketidaktepatan ini terjadi karena sistem pendataan dan pengawasan yang lemah. Tidak adanya proses verifikasi penerima berdasarkan NIK atau data kesejahteraan sosial seperti DTKS membuat siapa saja bisa membeli gas bersubsidi tanpa batasan di pasar. Akibatnya, subsidi tersebut tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sebenarnya tidak membutuhkan bantuan. Hal ini membuat keluarga miskin yang seharusnya menjadi prioritas malah kesulitan memperoleh kebutuhan dasar tersebut, sehingga memperlebar kesenjangan sosial.

#### **Distribusi yang Tidak Merata**

Masalah distribusi juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan subsidi LPG 3 kg. Dari hasil pengamatan di lapangan, distribusi gas bersubsidi di Desa Mendalo Indah lebih banyak terkonsentrasi di wilayah pusat desa, tempat terdapat agen resmi dan pengecer tetap. Warga yang tinggal di sekitar pusat desa lebih mudah mendapatkan gas dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan saat pasokan terbatas. Sebaliknya, penduduk di daerah pinggiran atau dusun yang jauh dari pusat distribusi mengalami kesulitan memperoleh LPG 3 kg. Mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh dan sering kali terpaksa membeli dari pengecer tidak resmi yang menetapkan harga jauh lebih tinggi, hingga mencapai Rp30.000 per tabung. Ketimpangan akses ini tidak hanya menambah beban ekonomi bagi masyarakat miskin, tetapi juga menimbulkan ketidaksetaraan dalam layanan publik antarwilayah di dalam desa yang sama. Ketika distribusi tidak merata dan tidak adil, kelompok yang secara geografis terpinggirkan menjadi semakin rentan, sehingga berkontribusi pada peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

#### **Penyalahgunaan oleh Pelaku Usaha**

Selain masalah distribusi dan ketepatan sasaran penerima, kebijakan subsidi LPG 3 kg di Desa Mendalo Indah juga menghadapi tantangan serius berupa penyalahgunaan oleh pelaku usaha mikro. Gas LPG bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga miskin malah digunakan oleh

pemilik usaha kecil seperti warung makan, pengusaha gorengan, dan usaha laundry. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan dan minimnya sanksi bagi pelaku yang melakukan penyalahgunaan. Meskipun pemerintah pusat telah melarang penggunaan gas subsidi untuk keperluan usaha, aturan tersebut tidak berjalan efektif di lapangan. Pelaku usaha dengan kemampuan ekonomi lebih baik dapat membeli gas dalam jumlah besar, sehingga pasokan cepat habis dan menyulitkan masyarakat miskin untuk mendapatkan LPG yang sama. Praktik ini tidak hanya menunjukkan ketidakadilan dalam akses subsidi, tetapi juga menciptakan ketimpangan struktural di mana kelompok dengan modal lebih kuat menguasai sumber daya subsidi demi keuntungan pribadi. Dengan demikian, subsidi yang seharusnya membantu justru malah memperparah ketimpangan ekonomi dan menggerus prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan kebijakan tersebut.

### **Dampak Sosial: Kecemburuan dan Ketidakpercayaan Antarwarga**

Masalah yang muncul akibat ketidaktepatan sasaran dan penyalahgunaan subsidi juga berdampak pada aspek sosial. Timbulnya kecemburuan sosial menjadi hal yang sulit dihindari ketika masyarakat miskin melihat tetangga mereka yang lebih mampu justru lebih mudah mendapatkan gas subsidi. Ketimpangan ini menimbulkan perasaan tidak adil dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Banyak warga merasa bahwa mereka yang seharusnya menjadi prioritas justru terabaikan. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan memilih menyembunyikan aset seperti kendaraan bermotor atau usaha kecil yang dimiliki agar tetap masuk dalam daftar penerima subsidi. Fenomena ini menggambarkan adanya praktik manipulatif yang berkembang akibat ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, situasi ini menurunkan tingkat solidaritas sosial antarwarga karena memicu kecurigaan, persaingan, dan ketegangan horizontal. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah juga menurun karena dianggap sistem tidak mampu menjalankan distribusi subsidi secara adil dan transparan.

### **Ketimpangan Ekonomi: Beban Energi yang Tidak Seimbang**

Kebijakan subsidi LPG 3 kg yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan utama justru menimbulkan ketimpangan ekonomi yang cukup besar. Ketika keluarga miskin kesulitan mendapatkan gas bersubsidi, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli gas dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau terpaksa kembali menggunakan kayu bakar yang kurang efisien, berisiko bagi kesehatan, dan berdampak negatif pada lingkungan. Kondisi ini meningkatkan beban pengeluaran sehari-hari mereka. Sementara itu, kelompok masyarakat yang lebih mampu yang menikmati subsidi secara tidak sah justru dapat mengurangi biaya hidup dan menggunakan sisa penghasilan untuk kebutuhan lain yang lebih produktif atau konsumtif. Dalam jangka panjang, keadaan ini memperlebar jurang kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya di tingkat desa. Subsidi yang semestinya menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan malah berubah menjadi sumber ketimpangan akibat lemahnya kontrol dan pengawasan. Oleh sebab itu, sistem subsidi yang terbuka seperti ini justru memperburuk distribusi pendapatan dan menghambat tercapainya pembangunan yang inklusif di tingkat lokal.

Dengan berbagai temuan tersebut, jelas bahwa implementasi kebijakan subsidi gas LPG 3 kg di Desa Mendalo Indah belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuannya. Ketidaktepatan sasaran, distribusi yang tidak merata, serta penyalahgunaan oleh pelaku usaha telah menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin terasa di tingkat lokal. Dampak sosial berupa kecemburuan, ketidakpercayaan antarwarga,

hingga manipulasi identitas untuk tetap memperoleh subsidi mencerminkan lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sufi 2021) yang mengatakan bahwa distribusi gas LPG bersubsidi juga tidak merata dan cenderung dikuasai oleh kelompok menengah, sehingga menimbulkan harga yang tinggi dan beban tambahan bagi kelompok miskin serta menemukan adanya penyalahgunaan subsidi oleh pelaku usaha mikro, seperti warung makan dan laundry yang berdampak pada menipisnya pasokan bagi rumah tangga miskin yang seharusnya menjadi prioritas.

Di sisi lain dalam penelitian (Mahardhika et al. 2025) menunjukkan bahwa penggunaan sistem berbasis data kependudukan dan aplikasi digital dapat memperkecil ketimpangan distribusi, serta memastikan subsidi lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan pentingnya perbaikan sistem distribusi dan pengawasan untuk menciptakan kebijakan subsidi yang lebih adil dan efektif dalam menekan ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat.

#### **4. Kesimpulan**

Hasil dari wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan subsidi gas LPG 3 kg di Desa Mendalo Indah belum terlaksana secara efektif. Meskipun secara normatif kebijakan ini dirancang untuk membantu kelompok rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari, realitas di lapangan memperlihatkan berbagai kendala yang justru memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu persoalan utama adalah ketidaktepatan sasaran penerima subsidi. Hal ini terjadi akibat lemahnya sistem pendataan dan verifikasi, sehingga masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas dapat dengan leluasa mengakses gas LPG subsidi, sementara keluarga miskin yang seharusnya menjadi prioritas malah kesulitan memperolehnya. Di sisi lain, ketimpangan juga tampak dalam aspek distribusi; suplai gas bersubsidi lebih terkonsentrasi di wilayah pusat desa, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran harus mengeluarkan biaya lebih tinggi karena akses yang terbatas dan harga jual yang melampaui HET. Tak hanya itu, penyalahgunaan subsidi oleh pelaku usaha mikro turut memperparah situasi. Banyak pelaku usaha kecil menggunakan gas bersubsidi untuk operasional bisnis mereka, padahal gas ini ditujukan khusus untuk rumah tangga miskin. Minimnya pengawasan dan lemahnya penegakan regulasi membuat praktik ini sulit dikendalikan.

Kondisi-kondisi tersebut menimbulkan dampak sosial yang cukup serius, seperti meningkatnya kecemburuan antarwarga, memudarnya solidaritas sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal penyaluran bantuan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi sistem penyaluran subsidi yang lebih adil dan transparan. Hal ini mencakup penerapan verifikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau data dalam DTKS, penguatan kontrol distribusi di tingkat lokal, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan LPG subsidi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan subsidi LPG 3 kg dapat kembali pada esensi dasarnya sebagai alat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat desa.

---

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Kemiskinan Dan Pola Konsumsi*. Vol. 8. Edited By Badan Pusat Statistik. Magelang.
- Dwi Lestari. 2023. "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Gas Lpg Subsidi di Indonesia." *Journal Of Economics and Social Sciences* 2.
- Izani, Muhammad Zidan. 2022. "Pengaruh Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Beras Miskin, Dan Subsidi Lpg 3 Kg Terhadap Jumlah Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Gresik." *Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 11(2).
- Mahardhika, Gita, Nur Hakim, Dhody A. R Widjajaatmadja, Jl Pulomas Selatan Kav, And Jakarta Timur. 2025. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Fenomena Penyalahgunaan Tabung Gas Lpg 3 Kilogram Bersubsidi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10(12). Doi:10.3783/Causa.V 2i9.2461.
- Munandar Hamzah, Alief, And Nasrul Haq. 2022. "Manajemen Kebijakan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kg Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa."
- Novaria Nainggolan, Lya, Khairul Akbar, Tetty Yuliaty, And Syech Suhaimi. 2024. "Tinjauan Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat Prasejahtera Dalam Menghadapi Fenomena Subsidi Listrik, Bahan Bakar Minyak Dan Gas di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 10(1).
- Reni Helvira. 2023. "ADZ DZAHAB Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Adz Dzahab Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam." 8(1).
- Suci Rahmalia, Ariusni, Mike Triani. 2019. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran , Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Indonesia." *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang* 1(1).
- Sufi, Sufi. 2021. "Penyaluran Gas Lpg Bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara: Kebijakan Pemerintah Versus Mekanisme Pasar." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 2.